

BAB IV

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Bahwa PPNS kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seharusnya dapat melakukan penyidikan TPPU selain melakukan penyidikan di bidang kehutanan walaupun dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tidak termasuk penyidik yang disebut didalamnya. PPNS kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang TPPU bahwa frasa penyidik tindak pidana asal dalam pasal 74 adalah penyidik yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w.
2. Konsep Pengaturan kewenangan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam TPPU harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang TPPU hal ini sebagai pelaksanaan Pasal 74 Jo Pasal 2 huruf w dan huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pindana Pencucian Uang.

3.2. Saran

1. Dalam proses penyidikan TPPU terkait *illegal logging* (pembalakan liar) bila dari awal proses penyidikan ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, PPNS Kehutanan untuk sementara melimpahkan penyidikan *illegal logging* kepada kepolisian, sehingga pelaku kejahatan kehutanan dapat

dijerat dengan Undang-Undang TPPU, karena jika dilakukan oleh PPNS Kehutanan, maka PPNS Kehutanan akan ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut pandangan JPU bahwa PPNS Kehutanan bukanlah penyidik tindak pidana asal sesuai penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, sehingga pelaku akan bebas dari jeratan TPPU jika penyidikannya tidak diberikan kepada kepolisian.

2. Pemerintah bersama DPR sebagai pembuat Undang-Undang agar segera merevisi Undang-Undang TPPU minimal menghapus penjelasan Pasal 74, sehingga dapat memperluas kewenangan penyidik dalam penanganan TPPU. Dalam hal ini semua PPNS diberikan kewenangan penyidikan TPPU terkait kejahatan tindak pidana asal khususnya PPNS Kehutanan sehingga penyidik PPNS Kehutanan mempunyai kewenangan dalam penyidikan TPPU.

DAFTAR BACAAN

- Admosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia cet.9, Jakarta, 1998.
- Al Mar, Idris Sarong, Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993.
- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Effendi, Tolib, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014.
- Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum, Perspektif Historis, Nuansa dan Busamedis, Bandung, 2004.
- Fuady, Munir, et.al., Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- , Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.
- Fukuyama, Francis, TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Qalam, Yogyakarta, 2007.
- Garnasih, Yenti, et.al., Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003.
- , Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Hadjon, Philipus M., et.al., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonsia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

- Hamzah, Andi, et.al., Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Chalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya, et.al., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hartono, Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta Bandung, 1982.
- Hart, H.L.A, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hiarieej, Eddy OS., et.al., Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- , Prinsip Prinsip Hukum Pidana edisi revisi, Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- H.S, Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Indroharto, et.al., Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Irman, Tobagus, Money Laundering Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Jajuli, M. Sulaiman, Kepatian Hukum Tanah Dalam Islam, Deepublish, Yoyakarta, 2015.
- Kan, L.J. Van dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- Lubis, Fauziah, Advokat Vs Pencucian Uang, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L, Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.
- Manullang, Fernando M., et.al., Pengantar Kefilsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007.
- , Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.
- Martokusumo, Sudikno, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, et.al., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- , Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi, Predamedia, Jakarta, 2008.
- , et.al., Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Murhaini, Suriansyah, Hukum Kehutanan Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011.
- Nasution, I. A. Karim, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, tanpa penerbit, 1976.
- Nawawi, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Preda Media Grup, Jakarta, 2011.
- Nugroho, Sigit Supto, Hukum Konversi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati, Lakeisha, Klaten, 2020.
- Obitzinski, Lucca Tacconi, Krystop dan Ferninandus Agung, Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan Dan Pengendalian Penebangan Liar Di Indonesia, Cifor, Bogor, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

- Prakoso, Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, et.al., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publihsing, Yogyakarta, 2009.
- , et.al., Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rawls, John, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Rukmini, Mien, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), PT Alumni, Bandung, 2006.
- Saleh, Watjik, Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sidharta, B. Arief, Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2006.
- Sofyan, Andi, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Stroink, F.A.M dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Suarga, Riza, Pemberantasan Illegal Logging, Wana Aksara, Jakarta, 2005.
- Sulistiyono, Adi, Mengembangkan Paradigma Non Ligitasi Di Indonesia, UNS Press, Surakarta, 2006.
- Sumarso, E., Etika Hukumr Elavansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Sumaryono, E., Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

- Sumaryono, E., Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar), Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Syaifullah, Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Criminal Dibidang Konversi Keanekaragaman Hayati), UIN Press, Malang, 2006.
- Tanya, Bernard L dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
- Utama, I Made Arya, Sanksi Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Kelestraian Fungsi Lingkungan Hidup, Jurnal Kertha Patrika. Vol 29 No 2.
- Widartiningsih, Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan, Setara Press, Malang, 2014.
- Wojowasito, W., Kamus Lengkap Format Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Pen. HASTA, 1980.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik dan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Yusuf, Muhammad, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan (PPATK), Jakarta, 2014.
- Yusuf, Muhammad, Kapita Selektu TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2016.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

JURNAL / MAJALAH / SURAT KABAR

Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Hadjon, Philipus M, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Human Rights Watch, Indonesia; “Wild Money”, The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector, (New York: HRW, 2009).

Kantaprawira, Rusadi, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.

Kartodiharjo, Haryadi, Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

MD, Moh. Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”,

yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

M. Echols, John, "An English-Indonesian Dictionary", Jurnal 1996.

Mulyosudarmo, Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.

Nuhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Hukum Ekonomi Politik, Kerja sama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2007.

Setiardja, A. Gunawan, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta, 1990.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.

Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Yuwono, Soesilo, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Alumni. Bandung, 1982.

INTERNET

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran> Lampiran 1 ICW Kerugian Keuangan Negara Di Sektor Kehutanan. Kamis, tanggal 28 April 2021, Pukul 21.00 WIB.

<https://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/>, Categories Tips Hukum, Minggu, 22/10/2017 12:00 WIB

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional>, Diakses Pada Tanggal 25 April 2015.

<https://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/>, Categories Tips Hukum, Minggu, 22/10/2017 12:00 WIB